

*“...diperlukan ketegasan yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk memperjelas aturan dan kode etik dalam pelaksanaan kerjasama khususnya di bidang – bidang sensitif seperti praktik intelijen.”*

## Indonesia–Australia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan

Pemberitaan media yang merespon paparan informasi dari harian berita Australia Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan Sydney Morning Herald mengenai dokumen penyadapan pejabat tinggi Indonesia menjadi puncak dari berbagai pemberitaan mengenai negara tetangga di sebelah tenggara tersebut. Berita ini memberikan pengaruh dramatis terhadap timeline pemberitaan media di Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini, dimulai dengan pemberitaan mengenai pemilihan umum di Australia sejak Juli hingga September, diiringi dengan kasus pencari suaka yang disinyalir sempat memunculkan ketegangan hubungan antara Indonesia – Australia. Saat ini, wajar jika kemudian ada yang mewacanakan bahwa hubungan Australia – Indonesia pasca kasus penyadapan ini bisa menjadi pengulangan kembali ketegangan hubungan seperti pada tahun 1995 dan 2006. Momentum ini membuat Australia mendadak menjadi populer di kalangan pencari berita Indonesia, setelah sebelumnya seringkali terabaikan dibandingkan mitra potensial Indonesia lainnya.

Ada beberapa hal menarik dari meningkatnya ketegangan hubungan diplomatik Indonesia – Australia saat ini. Pertama, dari sejarah hubungan bilateral kedua negara, seringkali negara Indonesia yang berada dalam posisi “dilukai”, hingga pemerintah negara Indonesia pula yang seringkali “menunda” pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Australia. Akar permasalahannya sama, rasa tersinggung dan sakit hati karena kedaulatan nasional dan apa yang diyakini sebagai kepentingan nasional diremehkan dengan berbagai cara. Rasa sakit hati ini jika sudah dirasakan baik di level pemerintah maupun level masyarakat Indonesia, bisa berdampak sangat buruk bagi kerjasama kedua negara. Apalagi dalam kasus penyadapan ini bisa jadi dianggap lebih sensitif dan berdampak politik yang signifikan karena mencederai keyakinan pemerintahan Indonesia di bawah Presiden SBY mengenai pandangan politik luar negeri Indonesia “a thousand friends zero enemy”. Jadi, ini bukan hanya karena masalah kedaulatan nasional, ini juga mencoreng pemerintah yang merasa “kecolongan” oleh “sahabat” sendiri.

Kedua, langkah politik dan non-politik sejatinya juga telah diambil untuk mengantisipasi dampak sistemik dari konflik ini. Tindakan politik yang menunjukkan dengan jelas kemarahan dan protes keras yang dilayangkan oleh anggota DPR Indonesia hingga Menteri Luar Negeri dan Presiden berujung pada penarikan sementara Duta Besar Indonesia untuk Australia. Lebih lanjut, langkah politik selanjutnya adalah mempertemukan kedua kepala pemerintahan, seperti halnya pada saat konflik suaka politik warga Papua tahun 2006. Hal ini bisa menjadi poin utama normalisasi hubungan bilateral Indonesia – Australia pasca kasus penyadapan supaya pembicaraan kasus ini tidak lagi hanya sekedar menjadi pencitraan negatif oleh pemberitaan media di kedua negara akibat saling lempar statement yang berpotensi menciptakan multitafsir lebih dalam. Informasi terbaru menyatakan bahwa telah ada korespondensi langsung antara PM Australia Tony Abbott dalam menanggapi pertanyaan Presiden SBY, meskipun tanggapan tersebut tidak menyiratkan permintaan maaf seperti yang dituntut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, seperti halnya yang dilakukan Barack Obama pada Angela Merkel saat diketahui Amerika menyadap telepon kanselir Jerman tersebut. Sedari awal Tony Abbott memang menyatakan keberatannya meminta maaf di parlemen Australia dengan pernyataan “Australia should not be expected to apologize for the steps we take to protect our country now or in the past”. Konsekuensi politiknya, Indonesia pun meningkatkan resistensinya dalam

bekerjasama dengan Australia. Hal ini dapat dilihat dari penolakan Indonesia untuk bekerjasama dengan Australia dalam kerangka kebijakan penyelundupan manusia Australia, serta menghentikan latihan militer bersama.

Di sisi lain, perlu diketahui publik bahwa ada upaya non-politik dari sektor strategis lain yang ternyata masih diupayakan oleh Indonesia untuk memastikan tali kerjasama kedua negara tidak serta merta terputus meski ada ketegangan diplomatik yang dinyatakan paling buruk sepanjang 14 tahun terakhir. Di tengah seruan pemutusan hubungan diplomatik selama klarifikasi kasus tengah berjalan, Indonesia melalui Wakil Presiden Budiono menyambut peluang kerjasama baru melalui jalur pendidikan dan kebudayaan yang ditawarkan Australia, yakni dengan pembentukan Pusat Studi Australia - Indonesia di Monash University yang melibatkan 3 universitas besar di Australia yakni Australia National University, Monash University dan Melbourne University. Program ini dirancang oleh Australia untuk memperbanyak "Indonesianis" disana.

Poin ketiga adalah perhatian (atau jika bisa dibilang kekhawatiran) Australia terhadap Indonesia sudah dinyatakan secara eksplisit maupun implisit, bahkan hingga ke tataran praktikal baik secara positif maupun negatif. Pernyataan utamanya jelas, bahwa Australia berkepentingan untuk mengetahui banyak hal mengenai Indonesia, yang mana hal ini menjadi bagian inti kepentingan nasional mereka terhadap negara tetangganya. Sebagai negara berdaulat, respon Indonesia tentu tidak bisa hanya merasa tersanjung karena dianggap penting oleh negara lain. Tindakan kita tidak bisa hanya sebatas tindakan reaktif setelah kecolongan informasi, namun kita bisa mempersiapkanantisipasi jangka panjang dengan tidak mengabaikan dan menganggap remeh perhatian negara lain terhadap Indonesia. Jika Australia menyiapkan negaranya memiliki cukup Indonesianis yang mengerti betul seluk beluk kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, bisakah kita menerapkan strategi yang sama?

Terakhir, dari preseden permasalahan yang lalu Australia dan Indonesia selalu berada dalam love-hate relationship. Hal ini berarti di setiap konflik yang ada pada akhirnya akan muncul "juru selamat" atau isu yang membangun kembali jembatan persahabatan kedua negara. Contoh terbaik menjelaskan adanya "juru selamat" atau momentum penyelamat ini adalah pernyataan resmi PM John Howard di era reformasi pasca ketegangan hubungan akibat kasus Timor Timur di era Presiden Soeharto. *Love-hate relationship* antara Indonesia dan Australia seterusnya akan tetap harus mewaspadai naik turunnya hubungan, mengingat kedua negara ini secara politik memiliki *nature* yang berbeda, namun posisi geografis yang menjadikan kedua negara ini bertetangga mengharuskan serangkaian kompromi tetap diupayakan. Indonesia dan Australia sama – sama memahami bahwa situasi regional dan internasional saat ini tidak akan kondusif jika konfrontasi dilanjutkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan kedua belah pihak. Faktor non – politis lah yang memiliki daya pengikat untuk mengantisipasi ketegangan politik dan juga mengembalikan kepercayaan Indonesia. Hanya saja, diperlukan ketegasan yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk memperjelas aturan dan kode etik dalam pelaksanaan kerjasama khususnya di bidang – bidang sensitif seperti praktik intelijen. Ketegasan semacam ini semestinya akan ditanggapi dengan baik oleh Australia mengingat konflik berkepanjangan dengan Indonesia kurang strategis bagi kepentingan nasional Australia khususnya demi rencana jangka panjang kebijakan penanganan imigran gelap. Demikian pula sebaliknya, Indonesia pun tidak bisa menyangkal kontribusi Australia melalui faktor – faktor non politis yang sudah demikian besarnya di Indonesia, baik melalui jalur pendidikan, kebudayaan, ekonomi perdagangan, bantuan luar negeri dan investasi. Jawaban Presiden SBY terhadap surat balasan Tony Abbott pun relatif menunjukkan Indonesia masih akan menjajaki hubungan kerjasama bilateral dengan syarat evaluasi penuh terhadap kode etik kerjasama. Semoga, kemarahan Indonesia yang cenderung ditanggapi secara pasif oleh Australia ini tidak dianggap sebagai aksi merajuk antar-kawan saja.

**R. Aj. Rizka F. Prabaningtyas, S. IP**

Program Officer-Program on Diplomacy and Foreign Policy  
Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada